

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam merumuskan judul skripsi ***“Relasi Kuasa dan Keterlibatan Nelayan Tradisional Pada Program Konservasi di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Nusa Tenggara Barat”*** , sebelumnya penulis telah menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang telah ada. Peneliti juga telah mempelajari dan menggali informasi dari ragam referensi jurnal, buku-buku maupun karya skripsi serta penelitian lainnya dalam rangka mendapatkan informasi mengenai teori yang berkaitan dengan judul tersebut dalam memperoleh landasan ilmiah. Berikut adalah sumber rujukan yang menjadi bahan pelajaran oleh penulis :

1. Rujukan Penelitian yang pertama berjudul ***“Relasi Kuasa Nelayan Dalam Struktur Laut di Pulau Gili Ketapang Probolinggo”***. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses relasi kuasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam struktur laut di Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo, dimana relasi kuasa tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan bersama mendapatkan hasil tangkapan ikan yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif

pendekatan deskriptif dengan teknik penentuan informan dengan cara *purposive* sampling dari data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan konsep kekuasaan Foucault sebagai landasan pemikiran dalam melihat bagaimana fungsi kekuasaan tersebut dipraktikkan.¹ Hasil penelitian menunjukkan

bahwa ada beberapa kategori nelayan di Pulau Gili Ketapang. Hal tersebut, berdasarkan pada jenis penggunaan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan setempat yaitu nelayan besar dan nelayan kecil. Di antara kedua jenis nelayan tersebut, terjadi relasi kuasa yang bersifat kekeluargaan, cair dan berdasarkan pada kesadaran bahwa satu sama lain merupakan sebuah kesatuan elemen yang penting bagi aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

2. Rujukan penelitian yang kedua berjudul ***“Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu”***. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya aktor dan relasi kekuasaan pada pengelolaan sumber daya laut Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan landasan teori dasar mengenai mekanisme terbentuknya akses oleh Ribot dan Peluso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktor membangun kekuasaan

¹ D Dwi Prasetya, *Relasi Kuasa Nelayan Dalam Struktur Laut Di Pulau Gili Ketapang Probolinggo*. Diss. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasi sosial dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron klien.²

3. Rujukan penelitian yang *ketiga*, berjudul ***“Kuasa Perempuan Pesisir Dalam Proses Pembangunan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember”***. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan masalah tentang bagaimana kuasa perempuan pesisir dalam proses pembangunan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini juga merupakan upaya untuk melengkapi kajian sebelumnya mengenai peran dalam kuasa perempuan pesisir dalam proses pembangunan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan landasan pemikiran pada teori kekuasaan Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumah tangga masyarakat Puger kulon, suami lebih memiliki kuasa dan kontrol sehingga lebih banyak bertindak sebagai pengambil keputusan dan berdampak pada kegiatan pembangunan yang

² Royandi, Eva, Arif Satria, and Saharuddin Saharuddin. "Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 8.2., 2019: 163-173..

dilaksanakan di Desa Puger Kulon.³

4. Rujukan penelitian yang keempat, berjudul ***“Relasi Kuasa, Mekanisme dan Strategi Meraih Kekuasaan dalam Program Social Forestry pada Taman Nasional Meru Betiri”***. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana hubungan pertukaran antara masyarakat desa penyangga kawasan konservasi di sekitar Taman Nasional Meru Betiri, Jawa timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan dua teori kekuasaan untuk melihat bagaimana fenomena relasi kuasa dan orientasi emosional dalam hubungan berpasangan antara masyarakat dengan taman nasional, dengan teori kekuasaan mengenai mekanisme dan strategi dalam memperoleh kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan tersebut, terdapat kekuasaan yang bersifat memaksa bagi warga masyarakat. Pengaruh dan hubungan kekuasaan dalam program pemberdayaan antara lembaga masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional Meru Betiri adalah bersifat negatif karena hubungan tersebut terjadi proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas ke bawah) dan ada wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi. Mekanisme

³ Rohimi, A. F. *Kuasa Perempuan Pesisir dalam Proses Pembangunan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 2019.

dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan peran hukum dan aturan belum disadari sebagai suatu perjanjian bersama antara masyarakat dan taman nasional sebagai suatu konsensus bersama.

Berdasarkan pada sumber-sumber kajian yang ditemukan oleh penulis, masih sedikit penelitian yang berfokus pada relasi kuasa dan keterlibatan nelayan pada program konservasi berbasis masyarakat. Begitu juga dengan referensi atau penelitian sebelumnya yang mengangkat tema mengenai kajian sosial dalam lingkup konservasi kelautan. Bahkan, masih sangat sedikit kajian yang ditemukan oleh penulis terkait dengan konservasi berbasis masyarakat yang melibatkan nelayan dalam pelaksanaan konservasi di kawasan pesisir dan ruang laut.

Penelitian ini dapat menjadi keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan kajian-kajian mengenai nelayan dan masyarakat pesisir lainnya yang juga sangat beragam. Dengan adanya perkembangan diskursus mengenai konservasi dan perlindungan sumberdaya alam berbasis masyarakat, maka menjadi penting untuk bisa memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi agar bisa dapat terlibat dan berkontribusi dalam memberikan masukan-masukan terkait dengan kondisi sosial masyarakat pesisir dan juga nelayan yang bersinggungan secara langsung dengan adanya kebutuhan untuk melakukan konservasi sumberdaya alam dan laut.

Dengan maraknya kasus-kasus perebutan ruang hidup dan ekologi baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun korporasi belakangan ini, maka kejelian untuk melihat bentuk relasi kuasa dan juga keterlibatan masyarakat menjadi suatu hal yang penting dan menarik dalam menjadikannya sebagai landasan pengetahuan pada pelaksanaan program konservasi lainnya.

Tabel 2. 1
Matriks Penelitian

<i>N o</i>	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Pertanyaan</i>	<i>Metodologi</i>	<i>Teori</i>	<i>Hasil Penelitian</i>
1.	Relasi Kuasa Nelayan Dalam Struktur Laut di Pulau Gili Ketapang Probolinggo	Bagaimana dinamika kekuasaan yang terbentuk dalam struktur laut pada nelayan di Pulau Gili Ketapang?	Kualitatif	Teori kekuasaan, Michel Foucault.	Relasi kuasa yang terjalin diantara nelayan besar dan nelayan kecil baik di darat maupun laut, bersifat kekeluargaan, cair dan berdasarkan pada kesadaran bahwa satu sama lain merupakan sebuah kesatuan elemen yang penting bagi aktifitas perikanan di kawasan tersebut.

2.	Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu	Bagaimana keterlibatan actor pada relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumberdaya laut di Palabuhanratu ?	Kualitatif	Teori Akses, Ribot dan Peluso.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua actor membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasi social dengan basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas social, otoritas, dan patron klien.
3.	Kuasa Perempuan Pesisir Dalam Proses Pembangunan Desa Puger Kulon Kecamatan	Bagaimana kuasa perempuan pesisir dalam proses pembangunan di Desa Puger Kulon Progo?	Kualitatif	Teori kekuasaan, Michel Foucault.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumah tangga masyarakat Puger kulon, suami lebih memiliki kuasa dan control sehingga lebih banyak

	Puger Kabupaten Jember				bertindak sebagai pengambil keputusan dan berdampak pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Puger Kulon.
4.	Relasi Kuasa, Mekanisme dan Strategi Meraih Kekuasaan dalam Program Social Forestry pada Taman Nasional Meru Betiri	Bagaimana hubungan pertukaran antara masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dalam program social forestry pada Taman Nasional Meru Betiri?	Kualitatif	Teori kekuasaan tentang sifat simetris / asimetris dalam relasi kekuasaan, Richard A. Schemerho m dan Robert Biersdt. Teori kekuasaan tentang	Penelitian menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang bersifat memaksa bagi warga masyarakat. Pengaruh dan hubungan kekuasaan dalam program pemberdayaan antara lembaga masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional Meru Betiri bersifat negatif karena

				mekanisme dan strategi kekuasaan, Michel Foucault.	adanya proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas ke bawah) dan ada wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi. Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan peran hukum dan aturan juga belum disadari sebagai suatu perjanjian bersama antara masyarakat dan taman nasional sebagai suatu konsensus bersama.
--	--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Teori Kekuasaan

Dalam memahami kekuasaan, Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan (*power*) selalu berimplikasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan sebaliknya. Bahwa kekuasaan selalu berada pada strategi yang dioperasikan pada setiap tingkatan. Jadi, kekuatan bukanlah monopoli kalangan atau kelas tertentu. Kekuasaan bersifat produktif, bahkan memproduksi pengetahuan. Ia melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*discursive field*) yang merupakan kompetisi bagaimana makna dan pengorganisiran institusi serta proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Pengetahuan harus dijelaskan berdasarkan institusi dan peristiwa yang berlangsung dalam institusi, baik bersifat teknis, ekonomis, sosial, maupun politik.⁴

Namun, institusi institusi itu sendiri tidak dapat berfungsi tanpa adanya kekuasaan yang bersifat institusional – tidak personal. Foucault tidak mempelajari kekuasaan dalam suatu proses mekanisme dimana kekuasaan tidak dipandang sebagai perwujudan atau konsekuensi logis dari kepemilikan ekonomis, tetapi sekadar sebagai strategi untuk melaksanakan sesuatu. Istilah strategi yang dimaksudkan bukanlah suatu kelompok individu dalam melaksanakan sesuatu, melainkan “dampak dari suatu posisi strategis”. Bahwa tipe-tipe *power* bukan berfungsi atau memfungsikan

⁴ Wirawan, DR IB. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana, 2012.

makna tindakan atau ucapan, karena ketentuan- ketentuan untuk bertindak dapat dibentuk langsung tanpa lewat perantara makna. Ia juga menjelaskan bahwa *power* atau kekuasaan tidak membatasi kelompok atau individu memaksakan kehendaknya pada pihak lain, dan *power* itu bersifat mendasar bagi semua interaksi sosial.

Dalam pandangan ini, ada lima proposisi tentang apa yang dimaksud sebagai kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang menandakan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*).

Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah kepemilikan atau kemampuan, kekuasaan bukanlah sesuatu yang tunduk pada atau melayani

kepentingan ekonomi. Ia menekankan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa atau negara. Kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kekuasaan bersifat jaringan, menyebar luas kemana-mana.

Foucault juga mengatakan bahwa analisis kekuasaan seharusnya tidak memusatkan perhatian pada tingkat tujuan sadar, tetapi pada poin penerapan kekuasaan, dengan kata lain, ingin mengubah titik pertanyaan seperti siapa yang memiliki kekuasaan? Atau apa tujuan atau maksud pemegang kekuasaan? Ke proses-proses yang membentuk subjek sebagai hasil pengaruh kekuasaan.

Bagi Foucault, pengetahuan memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan tanpa pengetahuan. Kekuasaan dan ilmu pengetahuan secara langsung berdampak pada yang lain, tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan bidang ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pada saat yang sama tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak mengisyaratkan dan merupakan hubungan kekuasaan.

Foucault juga menyebutkan bahwa kebenaran sangat ditentukan oleh kekuasaan dan sumber kekuasaan adalah ilmu pengetahuan. Semakin tinggi penguasaan ilmu pengetahuan, semakin tinggi pula kekuasaan yang didapatkan. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah penelitian tergantung dengan metode yang digunakan atau semakin banyak metode yang digunakan maka semakin kuat legitimasi pengetahuan

tersebut. Hal tersebut tampaknya berkaitan dengan semakin kuat kekuasaan yang dimiliki pengetahuan tersebut terhadap subjek, seperti yang dikemukakan Foucault sebelumnya.⁵

Di Indonesia, kegiatan maupun upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan konservasi diatur dan dijelaskan dalam UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam memahami kaitannya dengan kekuasaan, penulis memandang bahwa konservasi merupakan sebuah upaya untuk melindungi sebuah aset sumber daya alam yang berada di bawah aturan-aturan yang diatur dan dikelola oleh sebuah badan atau otoritas tertentu. Otoritas tersebut, bukanlah sebuah hal yang dikuasai oleh satu pihak yang bertujuan untuk “menguasai” hal-hal yang berada di bawahnya namun dilakukan atas dasar tujuan tertentu yang telah disepakati dan disetujui oleh berbagai pihak.

Dalam konteks hukum legal, dimana hukum dianggap sebagai sebuah sistem nilai, kawasan konservasi atau sering disebut sebagai kawasan lindung dilindungi oleh hukum undang-undang dan ditetapkan di bawah wewenang pemerintah pusat. Biasanya kawasan ini meliputi taman nasional, taman hutan dan taman wisata alam.⁶

Karena memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat, aturan hukum dan undang-undang yang mengatur tentang konservasi juga menjadi sarana/alat untuk mengatur masyarakat yang aktivitasnya

⁵ Foucault. M, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books. 1990. Hlm 59.

⁶ Damanik R., A, Satria. dan B. Prasetyamartati. *Menuju konservasi laut yang pro rakyat dan pro lingkungan*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta. 2006

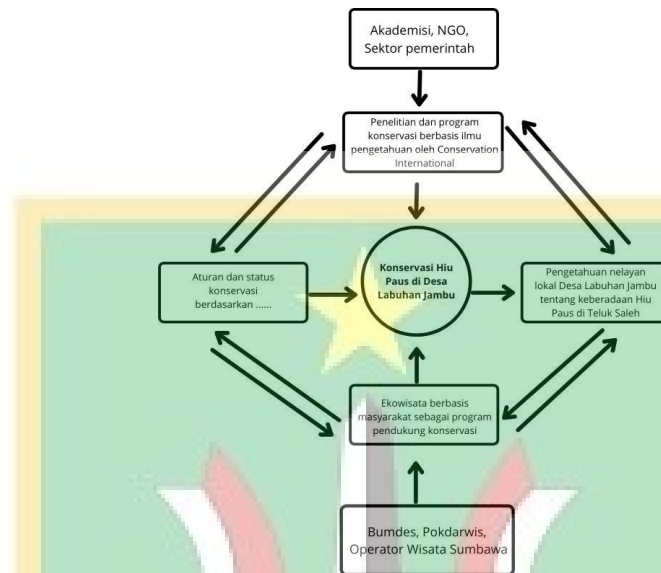
bersinggungan dengan objek yang menjadi tujuan konservasi sehingga, hal tersebut menjadi landasan mendasar dari adanya penggunaan instrumen kebijakan sebagai otoritas kekuasaan dalam menetapkan sebuah wilayah sebagai kawasan konservasi dengan batasan yang ada di dalamnya.

Ada beberapa jenis pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penetapan konservasi pada sebuah kawasan, yaitu; pendekatan jenis/spesies, pendekatan komunitas atau ekosistem, serta pendekatan kawasan dan manusia.

Jika dikaitkan dengan pandangan Foucault mengenai kekuasaan, konservasi dapat dilihat sebagai sebuah bentuk otoritas atau kekuasaan yang dijalankan berdasarkan tujuan yang didasari oleh berbagai jalinan bentuk pengetahuan, bersifat produktif, dan bahkan mampu untuk memproduksi adanya pengetahuan-pengetahuan baru sebagai hasil dari kompetisi dan pengorganisiran institusi melalui cara-cara yang khas, baik melalui cara-cara teknis, ekonomis, sosial dan juga politik.

Gambar 2. 1

Skema Sumber Pengetahuan Pada Program Konservasi di Labuhan Jambu



Dalam konsep kawasan konservasi yang bersifat teritorial atau kawasan, secara tidak langsung, kondisi geografis yang ditetapkan ke dalam kawasan atau wilayah konservasi memiliki sifat politis-yuridis karena batasan-batasannya yang dikontrol oleh suatu jenis kekuasaan tertentu.⁷ Hal tersebut, kemudian menjadikan faktor ruang dan wilayah sebagai suatu hal berkaitan dengan pengetahuan yang dapat dianalisis dalam kaitannya dengan daerah, wilayah, penanaman, perpindahan dan perubahan, dimana orang kemudian akan memahami proses dimana pengetahuan berfungsi sebagai sebuah bentuk kekuasaan yang sekaligus menyebarkan efek-efek kekuasaan tersebut.⁸ Adapun wacana penggunaan istilah metafora ruang

⁷ Foucault, M, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1. New York: Vintage Books. 1990., Hlm 59.

⁸ Ibid.

dan strategi kemudian dapat memuat kita mampu memahami banyak hal dengan tepat dimana wacana diubah melalui dan berdasarkan hubungan kekuasaan.

Secara teritorial, Desa Labuhan Jambu sejak akhir tahun 2019 telah ditetapkan ke dalam kawasan Cagar Biosfer Samota yang disahkan secara internasional oleh UNESCO. Hal tersebut, membuat masyarakat Desa Labuhan Jambu khususnya para nelayan, secara tidak langsung akan berada di dalam batasan teritorial yang ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah lokal dalam skala nasional.

Ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfer oleh otoritas kekuasaan, masyarakat yang berada di dalamnya mau tidak mau harus beradaptasi dan menyesuaikan penggunaan ruang dan wilayah berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan tersebut. Meskipun dalam pemetaan yang tertera menunjukkan bahwa kawasan Desa Labuhan berada dalam kawasan yang diperuntukkan sebagai zona pemanfaatan oleh masyarakat. Namun dengan adanya keberadaan satwa dilindungi yang kemunculannya dekat dengan wilayah aktivitas masyarakat, maka program konservasi tetap dilaksanakan sebagai salah satu prioritas pemanfaatan ruang dan wilayah yang dimaksudkan dan prioritas tersebut, hanya bisa terlaksana apabila ada kekuasaan yang bekerja dalam mewujudkan adanya wacana konservasi di dalam kawasan tersebut.

Wacana konservasi yang ditetapkan, bisa saja dalam bentuk paksaan yang diberikan oleh pihak negara, juga bisa datang melalui pihak eksternal seperti NGO atau lembaga masyarakat lainnya. Maka dari itu, otoritas kekuasaan dalam hal ini menjadi hal yang penting dalam bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat yang turut membentuk situasi dan kondisi sosial yang terjadi dalam program konservasi yang dijalankan dalam kawasan Desa Labuhan Jambu.

2.2.2 Relasi Kuasa

Dalam pemikirannya, Foucault mengakui bahwa ada banyak kekuatan dan kekuasaan yang menyebar secara luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan- kekuatan tersebut ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia seperti relasi antar manusia dengan manusia lain, dan juga relasi antara manusia dengan lingkungan dan situasi mereka.⁹

Tabel 2.2 Model Relasi Kekuasaan

Unsur-Unsur	Model Relasi Kekuasaan	
	Relasi Dominasi	Relasi Kekuasaan (Governmentality)
Model Relasi	<i>Unequal relation of power</i>	<i>Equal relation of power</i>
Aktor	<i>State-society, powerful- powerless, dominan- marginal</i>	<i>Between subject, between individuals</i>

⁹ Ritzer. G, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi kedelapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Hlm 1043.

Aparatus	<i>Dominasi and hegemony (disciplinary power and symbolic violence)</i>	-
Teknologi	<i>Violence and ideological, manipulation, consent</i>	<i>Conduct of conduct</i>
Basis relasi	<i>Domination vanish freedom</i>	<i>Freedom is basis of power relation</i>

Sumber : Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik¹⁰

Dalam genealogi kekuasaan, Foucault menaruh perhatian pada cara orang mengatur diri mereka sendiri dan orang lain melalui proses produksi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan menghasilkan kekuasaan dengan cara menempatkan masyarakat sebagai subjek dan kemudian mengatur subjek-subjek itu dengan menggunakan pengetahuan.¹¹

Dalam melihat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan, Foucault menganggap bahwa penyelenggaraan kekuasaan terus menerus dan akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu juga sebaliknya, penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.¹² Dalam konteks ini, tentu saja kekuasaan yang dimaksud adalah bentuk kekuasaan yang dapat menormalisasikan susunan-susunan yang kemudian terbentuk di dalam masyarakat. Sehingga, kekuasaan tersebut beroperasi tanpa disadari dan

¹⁰ Mudhoffir, A. M. Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. Masyarakat: Jurnal Sosiologi., 2015. Hlm 75-100.

¹¹ Eriyanto. Analisis wacana: pengantar analisis teks media. LKiS Yogyakarta, 2001. Hlm. 65

¹² Ibid.

berada di dalam jaringan masyarakat. Hal itu terjadi karena kekuasaan tersebut tidak berasal dari luar melainkan muncul dari dalam dan ikut menentukan susunan, aturan dan hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri.

Dalam penjelasannya, Tania Li menegaskan bahwa Foucault menengarai bahwa manusia dibentuk oleh praktik kepengaturan yang mungkin tidak mereka sadari, yang berlangsung tanpa persetujuan ataupun penolakan mereka.¹³ Bahwa kekuasaan bisa memberdayakan sekaligus memaksa, karena kekuasaan bekerja melalui praktik-praktik yang sebagian besarnya bersifat rutin dan keseharian. Namun, praktik-praktik kepengaturan juga dapat membentuk kelompok dengan pengalaman-pengalaman yang sama dan tidak hanya terbatas pada individu, sehingga ada peluang bagi wawasan kritis untuk disebarkan.¹⁴

Ketika ada sebuah kelompok sosial yang lahir dan mampu untuk mengenali adanya kepentingan bersama sehingga kemudian melakukan penggalangan demi mengubah keadaan mereka.¹⁵ Bentuk kolektif ini dapat mengandung adanya retakan-retakan gender, etnik, dan kelas tersendiri yang nantinya akan membentuk dasar bagi gagasan-gagasan dan aksi politik yang disebut sebagai “keterbalikan strategis” dalam relasi kekuasaan, yaitu pada saat diagnosa tentang kekurangan dan

13 Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri, 2016. Hlm 47-48

¹⁴ Ibid. Hlm 49

¹⁵ Ibid. Hlm 47-48

keterbelakangan yang dipaksakan dari atas “diambil alih” menjadi tuntutan yang seolah-olah dari bawah dan didukung oleh perasaan akan memiliki hak.

Dalam konteks program konservasi, hal tersebut dilihat sebagai potensi yang dapat memicu adanya tantangan-tantangan politik yang akan bergantung pada keadaan yang berjalan. Misalnya, pada kemunculan posisi-posisi yang bersifat kontradiktif seperti ketika ada kontradiksi antara penggencaran proses-proses kapitalis dan kehendak untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang justru mengalami dampak negatif dari proses tersebut, yang bisa berlangsung melalui sejumlah tata kepengaturan yang berusaha menyeimbangkan antara laba, kesejahteraan warga, dengan tujuan-tujuan lainnya.¹⁶

Kemudian, ketika cara perencanaan program perbaikan yang bermaksud untuk memangkas kesenjangan antara para wali masyarakat dengan masyarakat yang dianggap serba kurang, namun sesungguhnya justru mempertegas adanya batas yang menempatkan keduanya pada kedudukan yang berseberangan dan tak terjembatani.¹⁷

Adanya praktik-praktik kepengaturan membatasi peluang untuk berhubungan dan berurusan dengan masyarakat yang menjadi sarana upaya perbaikan dalam kapasitas mereka sebagai aktor politik, yang benar-benar mampu menentang dan mendebat karena adanya teknik-

¹⁶Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri.. Hlm 57

¹⁷ Ibid.

teknik kepengaturan yang bersandar pada pemisahan tegas antara kelompok yang mengaku paham bagaimana seharusnya orang menjalani kehidupan mereka, dengan orang-orang yang kehidupannya dianggap harus diarahkan sehingga membuat kedua belah pihak menjadi tidak bisa berdialog.¹⁸

2.2.3 Keterlibatan Sosial

Dalam pengertiannya, keterlibatan sosial/*social engagement* dipahami sebagai sebuah komitmen yang dihayati dan dilakoni dalam sebuah relasi yang tidak hanya dijadikan sebagai acuan nilai, namun juga sebagai ikatan sosial (*psikokultural religo*). Dalam pemahamannya, keterlibatan disini mengindikasikan adanya kondisi “terlibat” dalam sebuah situasi (relasional), dianggap dalam waktu yang relatif obyektif dan tidak harus dipersonalisasi cara, daripada orang yang ideal atau target; itu tidak berarti menciptakan hubungan yang dipahami sebagai ikatan.¹⁹

Secara sederhana, keterlibatan sosial dapat dikaitkan dengan tindakan sosial yang menurut pandangan Weber, merupakan terjadinya sebuah tindakan dapat dikatakan terjadi apabila individu melekatkan makna-makna subyektif kepada tindakan mereka.²⁰

¹⁸ Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri. Hlm 496-497.

¹⁹ Pierpaolo, Donati. "Social engagement: The viewpoint of relational sociology." *International Journal of Sociology and Anthropology* 5.4 (2013): 84-99..

²⁰ Ritzer. G, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi kedelapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2014. Hlm. 215.

Dalam hal ini, berarti apa yang dimaknai sebagai sebuah tindakan dapat dilihat dari empat tipe dasar²¹ yaitu :

1. *Tindakan rasionalitas alat- tujuan* atau tindakan yang ditentukan oleh pengharapan - pengharapan mengenai perilaku objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan-pengharapan tersebut digunakan sebagai “kondisi-kondisi” atau “alat-alat” untuk pencapaian tujuan sang aktor sendiri yang dikejar secara rasional.
2. *Tindakan rasionalitas nilai*. Yaitu tindakan-tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religius, atau bentuk lainnya, terlepas dari prospek-prospek keberhasilannya.
3. *Tindakan afektual*. Yaitu tindakan yang ditentukan oleh keadaan emosional sang aktor.
4. *Tindakan tradisional*. Tindakan yang ditentukan oleh cara-cara berperilaku sang aktor yang biasa dan lazim.

Dari keempat tipe tindakan tersebut, dapat dikatakan bahwa setidaknya ada empat tipe tindakan sosial yang bisa dijadikan sebagai dasar dari keterlibatan seseorang, yang dalam penelitian ini merupakan nelayan

²¹ Ritzer. G, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi kedelapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2014 Hlm. 216.

untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan konservasi baik itu bertentangan maupun yang sesuai dengan tujuan dari program pengelolaan yang berlaku di Desa Labuhan Jambu.

2.3 Konsep dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengertian Nelayan

Dalam pengertiannya, nelayan adalah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.²² Berdasarkan pada Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Revisi Undang-Undang no.45 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal , angka 10 mendefinisikan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.²³ Sedangkan nelayan kecil adalah orang yang melakukan penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dengan menggunakan kapal perikanan paling besar berukuran 5GT (Gross ton).

Pada penjelasan dalam undang-undang perikanan, ada perbedaan definisi antara nelayan dengan pembudidaya ikan, dan pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa pembudidaya ikan adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan sebagai sumber mata pencahariannya. Kemudian dalam pasal 1 angka 13, disebutkan bahwa pembudidaya ikan kecil adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁴

²² Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.Hlm. 26.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Desa Labuhan Jambu, adalah sebuah desa pesisir dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Jika dibandingkan dengan petani yang digolongkan ke dalam masyarakat agraris, nelayan sebagai masyarakat pesisir memiliki karakternya sendiri yang terbilang cukup unik. Hal ini, terbentuk dari bagaimana kondisi masyarakat tersebut dalam menghadapi sumber daya yang berada di sekelilingnya.

Jika masyarakat agraris seperti pertanian berhadapan dengan sumber daya yang terkontrol dengan pengelolaan lahan yang hasilnya relatif bisa diprediksi, maka berbeda dengan masyarakat nelayan di pesisir yang lebih bergantung pada sumber daya yang bersifat terbuka (*open access*) seperti lautan. Karakteristik sumber daya yang dihadapi oleh nelayan, khususnya nelayan kecil membuat para nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil yang maksimal, dengan demikian risiko yang dihadapi juga menjadi lebih tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan terbentuknya karakter nelayan yang keras, tegas, dan terbuka.²⁵

Namun, nelayan juga tetap memiliki kesamaan dengan masyarakat pertanian. Hal tersebut berada pada fakta bahwa nelayan juga memiliki sifat usaha dalam skala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, di mana eksploitasi sering kali berkaitan dengan masalah kerja

²⁵ Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.. Hlm.7.

sama, yaitu ketika sebagian



besar menyandarkan diri pada sumber ekonomi yang bersifat subsisten serta memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.²⁶

Berdasarkan pada karakternya, nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir dengan tipe komunitas desa pantai dapat dilihat dari beberapa aspek²⁷ yaitu:

1. *Sistem pengetahuan.* Hal ini biasanya terkait dengan teknik penangkapan ikan yang didapat secara turun temurun. Pengetahuan ini, biasanya berdasarkan pada pengalaman empiris yang diturunkan oleh orang tua mereka terdahulu. Adanya sistem pengetahuan lokal (*Indigenous Knowledge*) tersebut, juga merupakan sebuah kekayaan intelektual yang masih banyak dipertahankan hingga saat ini.
2. *Sistem kepercayaan.* Secara teologis, masyarakat nelayan biasanya memiliki sebuah kepercayaan bahwa lautan memiliki kekuatan magis, yang jika diperlakukan secara khusus maka akan membawa keselamatan serta membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Hal ini terlihat dari adanya ritual-ritual khusus yang biasa dilakukan sebelum pergi melaut oleh berbagai kelompok masyarakat nelayan.
3. *Peran perempuan.* Dalam masyarakat nelayan, perempuan pada umumnya menjalankan fungsi ganda melalui ranah domestik maupun ekonomi. Pada keluarga nelayan, perempuan biasanya juga bekerja sebagai pengolah ikan yang berperan sebagai penstabil ekonomi dikala masa suami mereka tidak pergi untuk melaut.
4. *Posisi sosial nelayan.* Pada masyarakat kebanyakan, posisi nelayan

²⁶ Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015 Hlm. 8.

²⁷ Ibid. Hlm. 16-24.

biasanya dianggap berada pada golongan status yang relatif rendah. Dalam hal politik, nelayan kecil juga dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga berakibat pada posisinya yang terus menerus dependen dan marginal. Namun hal tersebut juga berkaitan dengan pengaruh pada pendapatan kapital dari nelayan tersebut, yang biasanya juga berkaitan dengan jenis penggunaan alat tangkap yang digunakan.

Menurut Ditjen Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan. Berdasarkan pada waktu yang digunakan dalam melakukan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan, nelayan juga dapat diklasifikasikan sebagai²⁸:

1. Nelayan/petani ikan penuh. Adalah nelayan/petani ikan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
2. Nelayan/petani ikan sambilan utama. Merupakan nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Dalam tipologi nelayan yang dijelaskan oleh Charles²⁹, berdasarkan pada unsur ekologi (lingkungan), pola *human system*, dan aktivitas perikanan, nelayan juga dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu :

²⁸ Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015. Hlm. 27.

²⁹ Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015. Hlm. 32

1. *Subsistence fisheries*. Merupakan nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
2. *Native/indigenous/aboriginal fishers*. Merupakan nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya merupakan nelayan subsisten.
3. *Recreational fishers*. Merupakan nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai bentuk rekreasi saja.
4. *Commercial fishers*. Merupakan nelayan yang menangkap komoditas perikanan untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor, dan tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.

Berdasarkan pada struktur sosialnya, nelayan juga dicirikan dalam pola yang berhubungan dengan ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron klien tersebut, adalah sebuah konsekuensi dari adanya sifat kegiatan penangkapan ikan yang identik penuh dengan risiko dan ketidakpastian.

Bagi nelayan, adanya jalinan ikatan dengan patron merupakan sebuah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan kegiatan. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini, nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka.³⁰

Pola patron klien ini berada di dalam jaringan sosial masyarakat tersebut. Pola patron klien ini merupakan sebuah pola hubungan yang didasarkan pada *principle of reciprocity* atau asas timbal balik. Sementara itu, James Scott³¹ menjelaskan bahwa hubungan patron klien dalam masyarakat nelayan adalah sebuah fenomena yang

³⁰ Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015. Hlm. 39.

³¹ Ibid. Hlm. 40.

terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran tersebut, ada arus dari patron-klien maupun sebaliknya dimana, adanya arus tersebut pada umumnya mencakup pada :

1. Penghidupan subsistensi dasar dalam bentuk pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran hingga bantuan teknis.
2. Jaminan krisis subsistensi dalam bentuk pinjaman yang diberikan saat klien menghadapi kesulitan ekonomi.
3. Adanya perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi (musuh), maupun ancaman umum (tentara, pejabat, pemungut pajak dan lainnya).
4. Memberikan jasa kolektif berupa bantuan yang mendukung tersedianya sarana umum seperti sekolah, tempat ibadah, hingga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan adanya perayaan desa.

Adanya pola hubungan antara patron klien tersebut, dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada masyarakat nelayan di Pulau Panggang Taman Nasional Kepulauan Seribu, ternyata dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan sumber daya pesisir di kawasan tersebut. Adanya ikatan patron klien yang mempengaruhi usaha perikanan yang dilakukan oleh klien berdampak pada kepatuhan akan adanya aturan mengenai penggunaan alat tangkap/sarana budidaya di kawasan zonasi Taman Nasional kepulauan Seribu.³² Hal itu berjalan berdasarkan pada asas timbal balik atas dasar kebutuhan klien terhadap patron berupa penyediaan alat tangkap, dan kebutuhan patron atas adanya status berupa sertifikasi ramah lingkungan yang akan didapat melalui Dinas Kelautan dan Pertanian. Sehingga, patron berfungsi untuk mengontrol penggunaan alat tangkap yang digunakan oleh klien agar tidak menyalahi aturan-aturan

³² Satria, Arif. *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2015. Hlm. 48.

penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan potasium dan bahan peledak.

2.3.2 Pengertian Konservasi dan Konservasi Berbasis Masyarakat

Dalam beberapa dekade ke belakang, minat masyarakat umum untuk melindungi keanekaragaman hayati dunia semakin meningkat. Kelompok-kelompok ilmuwan, maupun masyarakat umum kini memahami bahwa generasi saat ini hidup dalam sebuah periode kemusnahan keanekaragaman hayati yang luar biasa.³³ Peristiwa kepunahan massal bagi keanekaragaman hayati sebenarnya juga pernah terjadi pada masa-masa geologi yang lalu. Dalam pola kepunahannya, pada masa tersebut kepunahan massal telah terjadi selama beberapa kali karena faktor lingkungan. Namun, berbeda dengan masa sekarang ini yang sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Belum pernah sebelumnya terjadi kerusakan yang disebabkan oleh makhluk yang demikian pandai yang merasa mempunyai moral dan budi pekerti, serta pemikiran bebas sebagai sifat unik dan khas mereka.³⁴

Dalam penjelasannya, Parsons menjelaskan bahwa upaya penyelamatan lingkungan bisa dilakukan melalui dua pendekatan sosial, baik melalui cara-cara yang dilakukan secara voluntaristik untuk merusak atau dengan cara memelihara lingkungan. Hal tersebut dikarenakan kerusakan lingkungan tidaklah lepas dari adanya pola struktur sosial dan sistem sosial yang terbentuk dari adanya eksistensi dari individu atau kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Persoalan lingkungan, mungkin tidak bisa dijelaskan sebagai motivasi internal secara individu melainkan sebagai produk gerak sistem yang anti ekologis. Sehingga, tercipta keterhubungan antara realitas sosial

³³ Indrawan. M, Primack. R.B, Supriatna. J, *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Ketiga., 2012. Hlm.3

³⁴ Indrawan. M, Primack. R.B, Supriatna. J, *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Ketiga., 2012. Hlm.3

dengan realitas ekologis.³⁵

Dalam kaitannya dengan pembangunan, Giddens dalam argumentasinya yang dijelaskan oleh Goldblatt, menyatakan bahwa ada dua argumentasi yang menjelaskan kaitan antara modernisasi dan kerusakan lingkungan. Yang pertama, adalah bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya degradasi lingkungan adalah konjungsi atau irisan antara kapitalisme dan industrialisme. Dan yang kedua, adanya asal usul kausal dari degradasi lingkungan dunia modern telah mentransformasi alam secara besar-besaran dalam tingkat yang belum pernah dialami oleh masyarakat-masyarakat manusia sebelumnya.³⁶

Para ilmuwan kemudian menyadari bahwa banyaknya ancaman terhadap keanekaragaman hayati itu bersifat sinergis. Ada banyak efek negatif dari berbagai factor yang berbeda seperti kemiskinan, logging (pembalakan hutan), kebakaran, dan perburuan berlebihan (*overhunting*) merupakan sebuah kombinasi yang meningkatkan, bahkan melipatgandakan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati.³⁷ Adanya bentuk ancaman tersebut, tentunya akan berdampak juga pada populasi manusia. Karena manusia, bergantung pada lingkungan alami untuk bahan baku, makanan, obat-obatan, bahkan air minum.

Pada umumnya, ada tiga unsur yang dipelajari dalam ilmu konservasi³⁸ yaitu :

1. Mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan dan keberlanjutan hidup di bumi alam ini.
2. Mengembangkan pendekatan praktis guna mencegah kepunahan spesies,

³⁵ Yanti, R., & Ibrahim, H. (n.d.). *Kajian Sosiologi Perilaku konservasi Dengan Wanatani Wilayah Semi Arid Katulistiwa (Studi Kasus : di Kecamatan Amarasi NTT)*. *Journal of Applied Agricultural Science and Technology*, 2(2): 55-70(2018). 2018. Hlm 57.

³⁶ Goldblatt, D, *Analisa Ekologi Kritis*, (terjemahan) Yogyakarta : Resist Book., 2015. hlm.35

³⁷ Goldblatt, D, *Analisa Ekologi Kritis*, (terjemahan) Yogyakarta : Resist Book, 2015. hlm.35

³⁸ Indrawan, M, Primack, R.B, Supriatna, J, *Biologi Konservasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Edisi Ketiga. 2012. Hlm.3

memelihara keanekaragaman genetika dalam spesies dan melindungi serta memperbaiki seluruh aspek keanekaragaman di bumi ini.

3. Mempelajari seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi.

Pada tahun 1997, adanya kekecewaan terhadap gangguan yang terus menerus muncul terhadap strategi pengelolaan sumberdaya dan pembangunan yang terencana, telah memaksa adanya pengakuan bahwa masyarakat memang memiliki peranan penting dalam pemenuhan tujuan dari program-program konservasi.³⁹ Hal tersebut kemudian menjadikan komunitas (masyarakat) tidak lagi dipandang sebagai halangan bagi adanya perubahan sosial yang progresif. Mereka bahkan dapat menjadi fokus pemikiran pada munculnya evolusi kekuasaan, partisipasi yang bermakna, dan otonomi budaya.⁴⁰

Dalam konservasi berbasis masyarakat, adanya pergeseran kekuasaan serta bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan, oleh otoritas mana, dan bagaimana terjadinya sebuah resistensi adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, penting untuk membangun adanya pemahaman yang memadai tentang bagaimana konservasi berbasis masyarakat yang terfokus, baik mengenai proses politik dari dalam maupun luar komunitas, tentang bagaimana politik turut juga berperan dalam terbentuknya program konservasi, hingga peranan penting dari lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.⁴¹

Dalam studi-studi terdahulu mengenai konservasi berbasis masyarakat, pada umumnya analisis-analisis yang paling banyak digunakan berkaitan dengan sejarah perubahan sosial masyarakat. Dimana, visi dari stereotip masyarakat dilihat sebagai

³⁹ Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. "Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation." *World development* 27.4 (1999): 629-649.

⁴⁰ Ibid..

⁴¹ Ibid

sesuatu yang organik secara keseluruhan, sebagai bagian dari suatu teritorial yang tetap, yang terlihat sebagai sesuatu yang terkikis oleh sejumlah kekuatan eksternal yang bertentangan dengan pasar dan negara.⁴²

Jika dilihat dari kacamata sejarah, maka kita akan dapat melihat bahwa dibutuhkan kehati-hatian dalam melihat dilema yang berkaitan dengan konservasi yang berhubungan dengan masyarakat, sebelum melakukan perangkulan secara tidak kritis dan cepat sebagai solusi umum terkait dilema-dilema yang muncul dalam pengelolaan konservasi.⁴³

Dalam pelaksanaan program konservasi yang efektif, setidaknya membutuhkan tiga domain tindakan sebagai bentuk dari solusi kelembagaan, yaitu⁴⁴ :

1. Pembuatan aturan dan praktik seputar konservasi
2. Penerapan aturan untuk memantau perilaku pengguna dan memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan
3. Penyelesaian perselisihan yang timbul dalam interpretasi dan penerapan aturan

Pada umumnya, dalam hal tersebut pemerintah memposisikan diri mereka sebagai pihak yang paling mempunyai hak untuk membuat aturan dan mengadili adanya perselisihan. Namun kemudian, menyerahkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada kelompok masyarakat (yang terlibat atau terdampak). Pendekatan dengan model cara tersebut, yang sebagian besar digunakan untuk program konservasi ternyata justru dianggap gagal.⁴⁵

⁴² Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. "Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation." *World development* 27.4 (1999): 629-649.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Agrawal, Arun, and Clark C. Gibson. "Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation." *World development* 27.4 (1999): 629-649.

Adanya orientasi komunal terhadap kebutuhan konservasi, seharusnya mensyaratkan bahwa kelompok-kelompok lokal, paling tidak semestinya mendapatkan peranan yang lebih besar dibandingkan apa yang mereka miliki sebelumnya dari masing-masing domain tindakan, dan para anggotanya hendaknya juga turut berkontribusi secara substansial terhadap penciptaan mekanisme untuk penggunaan sumberdaya.⁴⁶

Otonomi yang lebih besar untuk masyarakat, juga dapat diartikan bahwa aktor yang ditempatkan secara eksternal (pejabat pemerintah, LSM, lembaga bantuan) haruslah melepas keinginan mereka untuk mengontrol dan memprediksi hasil dari kegiatan konservasi berbasis masyarakat.

Secara global, saat ini konservasi berbasis masyarakat semakin diakui sebagai kekuatan utama dalam perlindungan serta pengelolaan ekosistem dan spesies yang berkelanjutan.⁴⁷ Meskipun, masih belum banyak dokumentasi yang mencatat tentang pencapaian dan kekurangan hingga masalah utama yang dihadapinya. Namun, dari berbagai studi yang ada mengenai pelaksanaan program konservasi berbasis masyarakat, terdapat beberapa pelajaran kunci yang bisa disorot sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan program konservasi berbasis masyarakat yaitu; Keamanan tenurial, penghormatan terhadap budaya dan keragaman kelembagaan, integrasi antara pengetahuan tradisional dan modern, pengakuan dan pemahaman yang sensitif terhadap kelembagaan lokal, penanganan terhadap ketidakadilan di tingkat lokal, saling berbagi otoritas dalam pengambilan keputusan, menghasilkan kehidupan yang layak dan berkelanjutan, memelihara atau menghidupkan kembali nilai-nilai masyarakat dalam menghadapi budaya serta perubahan ekonomi, mendorong peran fasilitator

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Kothari, Ashish, Philip Camill, and Jessica Brown. "Conservation as if people also mattered: policy and practice of community-based conservation." *Conservation and society* 11.1 (2013): 1-15.

sebagai agen perubahan, pemahaman akan pentingnya perbedaan antara pendekatan proses dengan pendekatan proyek, serta fokus pada kebutuhan konservasi berbasis masyarakat khususnya pada kawasan lanskap atau bentang alam yang luas.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya, masyarakat lokal pada faktanya tidak selalu memiliki jawaban atau sumberdaya yang cukup untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Khususnya dalam kondisi perubahan lingkungan yang sangat cepat seperti masa-masa kini. Disitulah pentingnya keberadaan agen eksternal baik dari lembaga pemerintahan, atau masyarakat sipil untuk dapat memainkan peranan penting dalam memfasilitasi proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Selain untuk membantu munculnya pemahaman dan kesadaran akan kebijakan dan masalah yang ada, sebagai penyedia forum bagi suara komunitas dalam mencapai kebijakan, berbagi wawasan dengan masyarakat lokal dengan ilmu pengetahuan modern, memperkenalkan teknologi tepat guna untuk masalah-masalah tertentu, dan lain sebagainya.

Dalam konteks konservasi di Desa Labuhan Jambu, peranan agen eksternal dalam program konservasi berbasis masyarakat di desa tersebut tidak terlepas dari kehadiran organisasi Conservation international (CI) sebagai sebuah NGO internasional yang sudah cukup lama menjadi partner bagi pemerintah. Keberadaan organisasi ini pun cukup erat kaitannya dengan wacana konservasi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan satwa dilindungi yang menjadi bagian dari kehidupan para nelayan di Desa Labuhan Jambu.

2.3.3 Peranan LSM/NGO Dalam Program-Program Konservasi

Sebagai lembaga yang seringkali berperan sebagai aktor dalam program-

⁴⁸ Kothari, Ashish, Philip Camill, and Jessica Brown. "Conservation as if people also mattered: policy and practice of community-based conservation." *Conservation and society* 11.1 (2013): 1-15.

program pembangunan, lembaga swadaya masyarakat non pemerintah (LSM) atau non governmental organization (NGO) memainkan peranan penting dalam membentuk dan mengimplementasikan bentuk-bentuk partisipasi dalam demokrasi. Organisasi formal maupun non formal, seperti gerakan-gerakan akar rumput bahkan sudah seharusnya dianggap sebagai partner implementasi dari agenda-agenda pembangunan.⁴⁹

Sebagai bagian dari gerakan lingkungan, pendekatan yang digunakan oleh kelompok-kelompok konservasi biasanya bergerak dari memandang lingkungan sebagaimana melihat hubungan timbal balik dengan situasi yang dihadapi oleh manusia, serta menegaskan adanya kaitan antara lingkungan yang alamiah dengan buatan manusia yang berada diantara kaitan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan.⁵⁰

Sejak awal kemunculannya, NGO bahkan telah memainkan peranan yang besar dalam gerakan lingkungan. Mereka adalah pihak yang paling awal menunjukkan adanya resiko lingkungan dan juga perubahan yang merupakan konsekuensi dari meningkatnya intensitas aktivitas manusia.⁵¹ Adanya interaksi antara para ilmuwan, kelompok-kelompok masyarakat, dan NGO kemudian mengarah pada munculnya kesadaran publik akan permasalahan lingkungan yang kemudian berubah menjadi tekanan politik yang menstimulasi pemerintah untuk bergerak dan merespon kondisi yang ada.⁵²

Sebagai organisasi yang berperan sebagai partner kerjasama pemerintah, CI

⁴⁹ Amando S.Tolentino,Jr. *The Role of Non Governmental Organizations In Marine Environment Protection, Sustainable Development and Preservation of the Oceans: The Challenges of UNCLOS and Agenda 21*, Proceedings The Law of the Sea Institute Twenty-Ninth Annual Conference. Bali: 1995. Hlm.137.

⁵⁰ Amando S.Tolentino,Jr. *The Role of Non Governmental Organizations In Marine Environment Protection, Sustainable Development and Preservation of the Oceans: The Challenges of UNCLOS and Agenda 21*, Proceedings The Law of the Sea Institute Twenty-Ninth Annual Conference. Bali: 1995. Hlm.137

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

yang bergerak di Desa Labuhan Jambu memiliki potensi untuk mengarahkan pandangan dari lembaga-lembaga kekuasaan yang lebih tinggi seperti kementerian daerah untuk merespon kondisi dan situasi terkait permasalahan lingkungan melalui cara-cara yang akan disepakati. Dalam ranah konservasi, organisasi ini pun bisa saja berperan menjadi otoritas kekuasaan yang ikut menentukan model pelaksanaan konservasi yang diberlakukan untuk melindungi satwa dilindungi yang berada di kawasan perairan Desa Labuhan Jambu yang menjadi wilayah aktivitas bagi para nelayan.

Jika Foucault mendefinisikan *episteme* sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berpikir, memandang, menguraikan serta memahami suatu kenyataan, maka NGO dapat dipahami sebagai sebuah bentuk epistema yang berperan sebagai aktor atau agen pembentuk wacana pengetahuan mengenai suatu isu permasalahan dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, organisasi CI sebagai NGO yang hadir di Desa Labuhan Jambu dapat berperan sebagai epistema yang erat kaitannya dengan kehadiran wacana konservasi di kawasan tersebut.

2.3.4 Relasi Kekuasaan Dalam Konservasi

Dalam memahami kekuasaan, pada umumnya kita melihat kuasa sebagai sebuah hal yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok yang digunakan untuk mengontrol pihak lainnya. Kekuasaan juga bisa dilihat sebagai sebuah kedaulatan (*sovereignty*) dan juga sebagai hukum yang biasanya tertanam dan dimiliki oleh individu/kelompok tertentu dalam suatu struktur hirarki pada relasi kekuasaan, dan legitimasi kekuasaan (hukum) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan adanya konsensus.

Berbeda dalam pandangan Foucault, konsep kekuasaan tersebut adalah konsep yang tidak dapat menangkap adanya kompleksitas relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat modern. Foucault menganggap bahwa dalam masyarakat modern, kekuasaan, dalam bentuk disciplinary power bukanlah sebuah hal yang dimiliki berdasarkan pada otoritas untuk mengontrol yang lain. Namun, berfungsi lebih dalam dan juga bekerja terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, hingga keluarga.

Disciplinary power, sebagai hal yang bersifat produktif mampu mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Menurut Foucault, subjek merupakan sebuah kendaraan bagi kekuasaan dan juga objek bagi pengetahuan. Kekuasaan tidak dilihat sebagai bentuk dominasi atas bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi hubungan antara yang *powerful* dengan *powerless*, melainkan bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan, juga harus dipandang sebagai sebuah pemahaman yang melanggengkan sebuah relasi atau bahkan mengisolasi pihak yang lain dari adanya sebuah relasi berlandaskan kekuatan. Disini, kekuasaan adalah sebuah strategi yang pada akhirnya berakibat pada relasi kekuatan itu sendiri.

Dalam konteks pembangunan, perencanaan dalam kawasan konservasi menjadi bagian penting untuk memastikan adanya sistem penjagaan dan pengelolaan dalam suatu wilayah, guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan tersebut. Dalam sejarah perancangan kawasan Taman Nasional, perlindungan keanekaragaman hayati adalah sebuah tuntutan yang tidak bisa dibantah dan merupakan tujuan yang paling utama, dan pada saat itu pandangan para konservasionis didukung oleh UU Pelestarian alam pada tahun 1990 an yang kemudian mendorong adanya pelarangan kegiatan manusia dalam kawasan perlindungan, khususnya di darat

yang berkaitan dengan pertanian dan hunian di dalam kawasan Taman Nasional. Sejak tahun 1990 an, konservasi berbasis kawasan seperti pada penetapan Kawasan Taman Nasional mendapatkan dukungan dari sejumlah donor serta LSM transnasional, dan 50% konservasi di Indonesia berasal dari sumber tersebut, begitu juga dengan penghasilan para ahli, birokrat dan staf LSM yang berkaitan di dalamnya.⁵³

Dalam perencanaan proyek terkait program konservasi terhadap masyarakat, rencana yang diusulkan mengajukan agar manfaat proyek bukan hanya untuk memberikan ganti rugi terhadap subjek yang terdampak oleh pembatasan aktivitas yang berkaitan dengan konservasi. Namun, juga agar masyarakat juga terdorong untuk menandatangani adanya “kesepakatan konservasi”. Dengan kata lain, rencana tersebut sebenarnya mengusulkan adanya pertukaran kepentingan. Untuk bisa mendapatkan manfaat dari sebuah proyek, sebuah keluarga atau seluruh anggota masyarakat harus menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi aturan taman nasional (sebagai area konservasi).⁵⁴

Di darat, adanya manfaat dari adanya proyek-proyek tersebut bagi masyarakat dapat berupa program peningkatan produksi di sektor pertanian, hingga adanya bantuan dana untuk membangun prasarana desa seperti jalan desa, jaringan perairan, serta pengendalian banjir.⁵⁵ Hal tersebut seakan menyebutkan bahwa ada imbalan atas kerelaan masyarakat dalam menerima adanya peraturan untuk melindungi wilayah konservasi, khususnya pada kawasan penyangga.

Pada konteks zonasi, perencanaan konsep pada program konservasi biasanya

⁵³ Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri, 2016. Hlm 239

⁵⁴ Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri, 2016. Hlm 239

⁵⁵ Ibid.

mengusulkan adanya dua langkah penguatan untuk mendorong masyarakat pada zona perbatasan agar mau mengikuti program tersebut yaitu⁵⁶ :

1. Meningkatkan penegakan aturan dengan “memagari” kawasan taman (areal konservasi) dari jamahan pihak-pihak luar.
2. Upaya untuk mendidik masyarakat dan pejabat mengenai manfaat konservasi. Dan ketika ada sejumlah masalah yang tidak diatur oleh hukum, penawaran utama yang dikeluarkan sebagai jalan keluar adalah dengan memberikan dorongan untuk mengembangkan cara berpikir dan perilaku baru di kalangan masyarakat.

(Contoh : Dampak dari migrasi penduduk yang berada diluar perencanaan resmi dalam pengelolaan zona kawasan).

Jika dilihat dari konsep tersebut, dalam proses melakukan proyek-proyek konservasi pada akhirnya akan mengarah pada proses pelembagaan perencanaan yang muncul dari bawah, “Yang memungkinkan warga menakar sumberdaya- sumberdaya lingkungan mereka dan membuat penilaian atas pilihan-pilihan pembangunan serta mencapai kesepakatan tentang baik buruknya migrasi kaum pendatang dan perlunya penerapan langkah-langkah pengendalian yang sudah ada”.⁵⁷

Dalam melihat relasi antara nelayan di Desa labuhan Jambu, dengan adanya upaya konservasi yang dilakukan oleh pihak yang datang dari luar seperti CI, penulis melihat bahwa wacana konservasi sebetulnya merupakan sebuah bentuk disciplinary power yang berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas manusia yang berada di kawasan tersebut. Bentuk kontrol ini sekaligus merupakan suatu penegasan bahwa

⁵⁶Ibid. Hlm.240

⁵⁷ Li, T. M. "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia translated by Hery Santoso and Pujo Samedi from The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics, Tangerang Selatan: CV." Marjin Kiri „2016. Hlm.241

ada sebuah hal penting yang harus dilindungi secara bersama-sama agar terlepas dari segala potensi kerusakan lingkungan yang mungkin dilakukan oleh aktivitas manusia yang berkaitan di dalamnya.

Sebagai sebuah bentuk kontrol, aturan konservasi seperti yang tertuang dalam peraturan undang-undang perlindungan hewan maupun kawasan merupakan sebuah bentuk aturan yang terstruktur, otoritatif dan legitimate. Hal tersebut, tentunya akan banyak mempengaruhi praktik-praktik sosial individu yang berkaitan dengannya baik dalam cara berpikir, berbicara maupun bertindak seperti yang dijelaskan oleh Foucault tentang suatu bentuk rezim pengetahuan. Dengan begitu, bentuk pengetahuan tersebut akan muncul seiring dengan pergantian masa dari sejak penetapan kawasan hingga kemudian membentuk sebuah pergeseran akan bentuk dari suatu pengetahuan ke bentuk pengetahuan lain yang lebih otoritatif pada waktu tersebut dalam bentuk rezim wacana. *Episteme*, sebagai bentuk pengetahuan baru kemudian lambat laun akan menjadi sebuah bentuk pengetahuan yang akan dimantapkan oleh masyarakat yang bergerak di dalamnya sebagai sebuah pemaknaan terhadap perubahan situasi yang terbentuk setelah masa adanya sebuah kondisi atau pelaksanaan dari upaya konservasi.

Adapun bentuk dari episteme tersebut, berhubungan dengan adanya pengetahuan ilmiah yang tidak berdiri sebagai suatu cara pandang dalam melihat pembedaan dan pemisahan dalam ranah praktis diantara yang mungkin untuk dilakukan atau yang dipikirkan dengan berdasarkan pada pengetahuan yang ilmiah. Hal itu dapat dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana strategi beroperasinya kekuasaan dalam pengetahuan yang berkaitan. Sebagai bagian dari perubahan struktur masyarakat, rezim wacana merupakan suatu bentuk dari kekuasaan yang terwujud dalam praktik-praktik yang mengorganisasikan dan juga terorganisir.

Sebagai sebuah wacana yang memiliki otonom dan klaim atas kebenaran serta

kontekstualisasi pengetahuan. Hal tersebutlah yang kemudian dapat mengubah konstelasi sosial yang sebelumnya ada. Dalam pandangannya, Foucault juga berpendapat bahwa tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan akan kebenaran yang bersifat final dan universal. Dalam kasus-kasus tertentu, akan ada masa dimana kekeliruan diakui sebagai sifat yang otoritatif dan legitimate. Kebenaran juga dapat di klaim sebagai bentuk beroperasinya sebuah kekuasaan sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi dan praktik social. Hal tersebut mengarah pada pandangan bahwa kekuasaan tidak beroperasi secara negatif melalui apparatus yang bersifat koersif dan menindas, namun kekuasaan beroperasi secara positif dan produktif.

Berdasarkan pada proporsinya, kekuasaan pada konteks nelayan dan kawasan konservasi di Desa Labuhan Jambou berada pada bagaimana aturan-aturan masyarakat yang ada disana saling mempengaruhi satu sama lain dengan para penggagas konservasi. Hal tersebut dilihat berdasarkan pemikiran penulis bahwa aturan yang berlaku terkait dua hal tersebut bukanlah aturan yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam oleh sekelompok individu saja namun dihasilkan dan dijalankan berdasarkan adanya relasi kesepakatan antara banyak pihak yang terus bergerak. Sehingga, kekuasaan tersebut juga dapat hilang atau punah apabila ada pihak-pihak di dalam relasi tersebut berhenti atau melenceng dari tujuan awal untuk menjalankan aturan tersebut.

Sebagai seperangkat aturan, tata kelola konservasi dijalankan oleh berbagai relasi yang terus bergerak. Maka, dalam hal ini, relasi kekuasaan bukanlah sebuah relasi yang bersifat struktural maupun hirarkis yang mengandaikan ada pihak yang menguasai dan ada pihak lain yang dikuasai.

Karena sifatnya yang intensional dan non subjektif, aturan mengenai konservasi ditujukan untuk mengatur sebuah objek permasalahan yang disepakati secara bersama, yaitu aturan dan larangan yang bertujuan untuk melindungi sebuah objek yang dikonservasikan.

Tabel 2. 2

Perbedaan pengelolaan konservasi dalam wilayah Konservasi Perairan Laut Daerah (KKLD) dengan pengelolaan konservasi di Desa Labuhan Jambu

Pengelolaan Konservasi		
Perbedaan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah NTB	Konservasi Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu
Aset Konservasi	Kawasan pulau-pulau kecil, kawasan ekosistem terumbu karang, kawasan ekosistem mangrove	Habitat dan spesies Hiu Paus
Kejelasan wilayah	Ada batas-batas wilayah yang jelas, dengan pembagian zonasi dan wilayah pemanfaatan.	Tidak ada batasan wilayah yang jelas dan objek merupakan hewan yang bergerak dan berinteraksi dengan aktivitas manusia.
Formalitas	Penetapan batas-batas wilayah bersifat formal dan diatur dalam peraturan tertulis. Berada di bawah aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Aturan formal berupa status perlindungan penuh, disetujui oleh pemerintah pusat dan diatur dalam aturan perlindungan kawasan, pelarangan aktivitas

		perdagangan dan pemanfaatan ekstraktif. Dalam konteks lokal, pengelolaan konservasi Hiu Paus di Labuhan Jambu diatur dalam Peraturan
		Desa.
Tanda Keberadaan	Batas wilayah atau kawasan menggunakan tanda alam dan batas wilayah administratif.	Kemunculan hiu paus di kawasan perairan yang digunakan sebagai areal <i>fishing ground</i> oleh nelayan lokal. Seringkali muncul bersamaan dengan aktivitas nelayan di pagi hari.
Pengelolaan	Wisata alam	Wisata alam
Hambatan dan tantangan	Aktivitas pengeboman dan penggunaan potasium di dalam kawasan, pariwisata tidak bertanggung jawab, limbah dan pencemaran dari aktivitas manusia, efektifitas badan pengelola kawasan.	Aktivitas pengeboman dan penggunaan potasium di dalam kawasan habitat, pariwisata tidak bertanggung jawab, limbah dan pencemaran dari aktivitas manusia, efektifitas badan pengelola wisata, penangkapan dan perdagangan ilegal, persepsi negatif nelayan terhadap keberadaan hewan tersebut.

Karena merupakan wilayah *fishing ground* yang merupakan kawasan sumber ekonomi bagi masyarakat, dan hewan yang dianggap sebagai objek konservasi tidak bisa dibatasi dalam pergerakannya, maka akan sangat sulit apabila konservasi yang diberlakukan untuk hewan tersebut dilakukan dengan cara menetapkan sebuah konsep yang menggunakan batasan-batasan wilayah seperti yang pada umumnya dilakukan di kawasan konservasi seperti taman nasional atau areal perlindungan laut dengan kawasan terumbu karang sebagai aset utamanya.

Maka dari itu, perlindungan habitat bagi hewan laut tersebut haruslah berangkat dari upaya yang dilakukan untuk mengatur aktivitas masyarakat dan kegiatan yang berjalan di sekitarnya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa adanya model konservasi yang diterapkan pada masyarakat di Desa Labuhan Jambu merupakan sebuah bentuk episteme yang dimaksudkan oleh Foucault, dimana terjadinya makna mengenai konservasi adalah sebuah bentuk pengetahuan baru yang masuk kedalam masyarakat, khususnya nelayan yang kemudian menjadi sebuah hal formal yang dijadikan sebagai sebuah legitimasi untuk membatasi adanya aktivitas atau praktik-praktik ilegal yang dianggap membahayakan keberadaan dari objek konservasi di kawasan perairan yang biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan di Desa Labuhan Jambu.

Proses dari kemunculan model konservasi yang diterapkan kepada para nelayan di desa tersebut, dari sejak awal masuknya lembaga konservasi hingga terbentuknya konsep pengelolaan konservasi berbasis masyarakat di Desa Labuhan Jambu, dapat menjadi acuan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana strategi kekuasaan dalam pengetahuan yang berkaitan dengan konsep konservasi yang hadir di sana. Adanya perubahan pengetahuan yang melibatkan para nelayan tentunya juga akan berkaitan dengan adanya perubahan rezim wacana mengenai masa dari sebelum hadirnya bentuk konservasi di desa tersebut ke masa setelahnya.

Nelayan, sebagai pihak yang paling sering bersentuhan secara langsung dengan objek konservasi sedikit banyak pasti memiliki keterlibatan dalam hadimya pengelolaan konservasi yang diterapkan. Dalam keterlibatan tersebut, akan terlihat apakah bentuk operasi dari kekuasaan yang muncul kemudian dapat dipandang sebagai sebuah relasi yang bersifat negatif atau positif, mengingat bahwa kekuasaan juga merupakan suatu wacana yang dipengaruhi oleh praktik sosial yang juga dipengaruhi oleh institusi-institusi yang hadir dan apakah kekuasaan tersebut berkaitan dengan keterlibatan para nelayan dalam peranannya menjadi bagian dari pengelolaan konservasi yang dimaksudkan.

2.3.5 Keterlibatan Nelayan Dalam Konservasi

Dalam program konservasi hiu paus di Desa Labuhan Jambu, para nelayan bagan adalah aktor yang paling sering berinteraksi dengan hewan tersebut. Sehingga, kebiasaan dan pengetahuan lokal mereka mengenai waktu dan titik kemunculan hewan tersebut menjadi kunci dari adanya aktifitas pemantauan dan juga penelitian yang dilakukan oleh para penggiat konservasi dari luar kawasan Labuhan Jambu seperti organisasi CI. Pengetahuan lokal para nelayan dalam menemukan titik keberadaan hiu paus di lautan, kemudian dimanfaatkan untuk digunakan sebagai sarana pendukung pariwisata atraksi hiu paus yang mendatangkan pemasukan tambahan bagi nelayan yang terlibat sehingga mendapatkan keuntungan dalam bentuk ekonomi.

Dari hal tersebut, setidaknya ada keterlibatan dalam bentuk kerjasama antara nelayan dengan organisasi CI dalam memetakan keberadaan hewan yang menjadi objek konservasi dalam program tersebut yang menguntungkan secara akses dan ekonomi. Dimana nelayan bukan hanya terlibat dalam kegiatan pariwisata, namun juga sebagai pemberi akses kepada para peneliti CI yang memiliki kepentingan yang berkaitan

dengan objek penelitian dan konservasi sebagai program utama yang mereka bawa ke Desa Labuhan Jambu. Begitu juga dengan nelayan lain yang terlibat dalam penyewaan perahu yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Selain adanya faktor ekonomi sebagai pendukung keterlibatan, faktor pengetahuan dan juga budaya juga dapat menjadi faktor lain yang akan memberikan pengaruh pada keberhasilan atau munculnya kendala dalam pelaksanaan program pariwisata berbasis masyarakat untuk konservasi.

Sebagai kawasan yang rawan dengan praktik perikanan ilegal, bukan tidak mungkin bahwa para nelayan di Labuhan Jambu juga merupakan aktor dari tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, misalnya dengan ikut menggunakan potasium dan bahan peledak untuk penangkapan ikan dan juga pelaku perdagangan ilegal hewan laut yang dilindungi. Begitu juga dengan aktivitas perilaku masyarakat di kawasan pesisir, menurut penulis juga turut andil dalam menentukan kualitas lingkungan yang secara teritorial merupakan desa dimana program-program yang terkait dengan pengelolaan konservasi diberikan.

Berkaitan dengan konsep relasi kuasa yang juga dijelaskan oleh Tania Li, situasi yang berjalan dalam proses perencanaan program konservasi di Desa Labuhan Jambu tentunya berjalan dengan menghasilkan bentuk-bentuk kepengaturan baru yang juga berpotensi untuk memunculkan adanya kelompok-kelompok baru dengan penambahan pengetahuan sehingga bisa saja kelompok tersebut muncul dalam bentuk yang kontradiktif sehingga memunculkan dinamika tertentu dalam perkembangannya. Hal ini bisa menjadi apa yang disebut oleh Foucault sebagai kelompok resisten yang merupakan konsekuensi politik dari bertambahnya pengetahuan dalam jalinan relasi kuasa yang terus berkembang dan berjalan.